

## **Bab IV**

### **Analisis Lingkungan dan Isu-Isu Strategik Pembangunan**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo Tahun 2008-2013 pada dasarnya disusun dengan menerjemahkan suatu proses pemikiran strategik terhadap kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi yang disesuaikan dengan arahan kebijakan pembangunan nasional dan regional Propinsi Sulawesi Selatan, sehingga kualitasnya sangat ditentukan oleh seberapa jauh dokumen RPJMD dapat mengemukakan secara sistematis proses pemikiran strategik tersebut. perencanaan strategik erat kaitannya dengan proses penetapan kemana arah daerah atau organisasi akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan, bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan.

Sebagai sebuah proses perencanaan strategik maka salah satu tahapan proses yang sangat penting adalah tahap melakukan analisis situasi dan identifikasi isu strategik dan kecenderungan perkembangannya serta melakukan analisis atas kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi dalam pembangunan daerah sehingga dengan demikian melahirkan pemahaman terhadap substansi permasalahan yang dihadapi, dan kesadaran terhadap kemampuan dan kelemahan yang dimiliki. Kebijakan atau keputusan yang tepat ditentukan oleh kualitas informasi dan kedalaman analisis terhadap lingkungan strategik yang dilakukan oleh para pengambil keputusan

Dalam pembangunan daerah, perencanaan strategik dapat dipandang sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pemikiran strategiknya terletak pada strategi untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia., untuk menyelesaikan masalah-masalah atau isu-isu strategik yang berkembang. Hal-hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

## **A. Analisis Lingkungan Strategik**

### **I. Analisis Lingkungan Internal**

Lingkungan strategis internal adalah faktor-faktor internal yang dimiliki berupa kekuatan (strengths) atau potensi dan modal dasar dalam pembangunan sehingga perlu dipahami kekuatan dan kelemahannya. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya adalah.

#### **a) Kekuatan**

Kekuatan yang dimiliki Kota Palopo dalam pengelolaan pembangunan daerah sebagai berikut :

##### **1) Dimensi spiritual, dan kultural sebagai basis nilai dalam pembangunan Kota Palopo.**

Pada dasarnya masyarakat Kota Palopo adalah masyarakat yang religius dimana nilai-nilai keagamaan masih menjadi basis nilai yang dianut pada segala aktivitas kehidupan masyarakat. Agama memiliki nilai-nilai religi yang bersifat universal antara lain kewajiban manusia untuk berupaya hidup sejahtera.

Disamping itu, masyarakat Kota Palopo juga memiliki nilai-nilai budaya luhur yang mengakar kuat, manusia yang berbudaya identik dengan sikap yang memelihara keseimbangan antara daya cipta, karya dan karsa, menghargai nilai-nilai kemanusiaan, memiliki apresiasi terhadap seni, menghargai kemajemukan dan perbedaan, hal ini menjadi pula salah satu basis nilai dalam pembangunan daerah.

##### **2) Letak strategis wilayah Kota Palopo.**

Letak geografis Kota Palopo sebagai salah satu wilayah yang berada pada titik pusat lintasan menuju daerah Sulawesi Tengah dan Tenggara dengan daya dukung wilayah hinterland, menjadi nilai tersendiri bagi Kota Palopo terhadap akses dengan wilayah lainnya. secara geografis posisi Kota Palopo sangat memungkinkan untuk menjadi daerah transit bagi pelaku ekonomi, dengan demikian Palopo dapat menjadi cadangan distribusi bagi daerah-daerah

hinterland yang ada disekitarnya yang memiliki potensi pertanian yang sangat besar

### **3) Perekonomian daerah telah berkembang**

Perekonomian Kota Palopo telah cukup maju dengan struktur ekonomi yang tidak lagi didominasi oleh sektor agraris. Struktur ekonomi Kota Palopo ditopang oleh tiga sektor utama yakni pertanian, Perdagangan hotel dan restourant, dan sektor jasa-jasa sehingga dengan demikian struktur ekonomi telah menunjukkan perkembangan struktur ekonomi moderen dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 7,14 % per tahun dengan income perkapita penduduk telah mencapai Rp. 7,4 juta perkapita

### **4) Kondisi keamanan daerah yang kondusif**

Salah satu syarat mutlak bagi berlangsungnya pembangunan daerah adalah terciptanya kondisi keamanan yang kondusif. Kondisi aman dan damai telah tercipta di Kota Palopo sebagaimana telah dibuktikan dengan berlangsungnya tahapan pesta demokrasi pada Pilkada yang berlangsung dengan baik. Kondisi seperti ini akan menunjang pergerakan perekonomian lebih cepat

### **5) Tersedianya Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana dasar yang memadai menjadi salah satu modal dasar dalam pembangunan. Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan berupa jalan dan transportasi, listrik, air bersih, telepon, bank, sarana pendidikan, rumah ibadah dan rumah sakit, merupakan salah satu bentuk “insentif”, yang memberikan kemudahan bagi pelaku ekonomi untuk berinvestasi. Jika dibandingkan dengan ketersediaan sarana dan prasarana di wilayah lainnya di Sulawesi Selatan, Kota Palopo termasuk salah satu Kota yang memiliki sarana dan prasarana lebih lengkap.

### **6) Dukungan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pembangunan**

Salah satu kunci sukses pembangunan adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat Kota Palopo memiliki tingkat partisipasi yang

tinggi dalam pembangunan daerah, antara lain terlihat dari partisipasi penggunaan hak pilih pada Pilkada kepala daerah, partisipasi yang tinggi dalam gerakan bangun praja, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan suatu kebijakan publik.

#### **7) Kualitas sumber daya manusia telah berkembang**

Kualitas sumber daya manusia dapat diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yakni nilai rata-rata dari tiga komponen utama pembangunan manusia yakni pendidikan dengan indikator rata-rata lama sekolah, kesehatan dengan indikator usia harapan hidup, dan ekonomi dengan varitas daya beli. IPM Kota Palopo saat ini merupakan salah satu IPM yang cukup berkembang, secara nasional berada pada urutan ke 51 dari sekitar 400 Kabupaten/Kota, dan secara regional berada pada urutan ke 3 dari 23 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan

#### **b) Kelemahan**

Identifikasi terhadap kelemahan-kelemahan yang dimiliki Kota Palopo dalam pembangunan daerah antara lain :

##### **1) Kualitas SDM yang masih lemah**

Kelemahan Sumber Daya Manusia terkait dengan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, kemampuan penguasaan Ilmu pengetahuan dan teknologi, daya respon yang lemah terhadap peluang yang datang dari luar lingkungannya berupa peluang dagang, industri, dalam rangka memenuhi kebutuhan fisik dan sosial. Sehingga meski data IPM Kota Palopo cukup tinggi namun kapasitas dan daya saing sumber daya manusia masih lemah jika dibandingkan dengan kapasitas dan daya saing sumber daya manusia dari daerah lainnya khususnya dari Pulau Jawa. Kualitas Sumber Daya Manusia yang lemah juga terlihat dari angka pengangguran yang mencapai 11% dan kemiskinan absolut yang mencapai 12,14%

## 2) **Pengelolaan potensi sumber daya alam belum optimal**

Kota Palopo memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar antara lain berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia. Potensi sumber daya alam yang utama adalah potensi pertanian namun produktivitas pengelolaan sektor pertanian masih rendah jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya, Rendahnya produktivitas hasil pertanian dapat pula dilihat dari rata-rata produksi padi yang baru mencapai 4,25 ton/Ha, dimana produksi pada tahun 2006 sebesar 22.645,44. ton dari luas areal sawah seluas 5.322 Ha sementara jika dibandingkan dengan produksi padi di tempat lainnya di Sulawesi Selatan telah mencapai 8 ton/HA, produktivitas hasil tambak baru mencapai 4,7 ton/ha jumlah produksi ikan tambak pada tahun 2007 berjumlah 7.400 ton dari areal lahan tambak seluas 1.556 Ha, kondisi ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan produktivitas hasil tambak pada daerah lainnya di Sulawesi Selatan. Sementara penduduk Kota Palopo yang bekerja di sektor pertanian mencapai 32%.

## 3) **Masih lemahnya koordinasi penataan ruang**

Kewenangan dalam penataan ruang masih dilaksanakan secara parsial oleh masing-masing unit kerja. Belum tersosialisasinya penataan ruang Kota Palopo menjadikan adanya tumpang-tindih di sektor ini. Belum terpadunya koordinasi pembangunan secara kewilayahan banyak mempengaruhi penataan dan pengendalian wilayah perbatasan yang tentunya sangat berpengaruh dalam hal pemanfaatan ruang. Masih terdapatnya beberapa wilayah dengan aksesibilitas rendah seperti wilayah Sumarambu dan wilayah Minjana mempengaruhi peningkatan perekonomian masyarakat yang tentunya akan berdampak pada rendahnya income perkapita masyarakat.

## 4) **Lemahnya kesadaran tentang pelestarian lingkungan**

Kota Palopo memiliki keterbatasan lahan dan sumber daya air, oleh karena keterbatasan sumber daya alam tersebut, maka pengelolaan secara parsial akan mengakibatkan menurunnya fungsi lingkungan, dan akan merusak

kelestarian lingkungan secara makro seperti adanya berkurangnya sumber air, terjadinya abrasi pantai, proses pendangkalan sungai, pencemaran lingkungan dan penurunan air permukaan. Perkembangan Kota yang pesat memang menuntut penyediaan lahan permukiman sehingga setiap tahun diperkirakan akan terjadi alih fungsi lahan dan lingkungan.

**5) Profesionalisme aparatur pemerintah masih rendah dan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat masih lemah**

Kemampuan sumber daya aparatur dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi masih rendah. Salah satu indikator kelemahan tersebut adalah rendahnya penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Kualitas dalam pelayanan publik juga masih lemah, salah satu sebabnya adalah belum adanya standar pelayanan yang baku terhadap semua jenis pelayanan publik, dan respon yang lemah terhadap tuntutan reformasi birokrasi adalah penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) yang berbasis pada prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas.

**6) Terbatasnya Dukungan infrastruktur daerah.**

Kondisi sarana dan prasarana inprastruktur pada adasarnya telah tersedia, seperti sarana transportasi, ketenagalistrikan, energi, sumber daya air, perumahan, pelayanan air minum, dan penyehatan lingkungan, namun kondisinya belum terpenuhi secara merata dan kapasitas daya dukungnya masih terbatas, sebagaimana telah digambarkan bahwa sarana dan prasarana inprastruktur wilayah masih belum terdistribusi secara merata, beberapa wilayah masih rendah indeks aksesibilitasnya, kebutuhan inprastruktur terutama untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah menjadi suatu tuntutan sementara kebutuhan Pembangunan infrastruktur dihadapkan pada terbatasnya kemampuan pembiayaan dari pemerintah. Pada sebagian infrastruktur, pemerintah masih bertanggungjawab terhadap pembangunan dan pemeliharannya, misalnya pembangunan jalan, jaringan irigasi, air bersih dan irigasi, serta listrik perdesaan. Pada sebagian lain, penyediaan dan pembangunan beberapa jenis infrastruktur sebenarnya dapat dilakukan

sepenuhnya oleh swasta, seperti jalan tol, pembangkit tenaga listrik, dan telekomunikasi.

## **II. Analisa Lingkungan Eksternal**

### **a) Peluang**

Peluang yang dapat diraih dalam pengembangan Kota Palopo di masa yang akan datang sebagai berikut:

#### **1) Pelaksanaan Otonomi Daerah**

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai mana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pada prinsipnya memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri sesuai aspirasi masyarakat serta kondisi obyektif daerahnya. Otonomi daerah akan dapat meningkatkan keberpihakan pembangunan kepada masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong proses demokratisasi di daerah ke arah yang lebih berkembang.

#### **2) Dukungan Pemerintah Pusat dan lembaga pendanaan lainnya**

Sebagai sebuah kota yang telah mengalami perkembangan secara signifikan, maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan memberikan perhatian khusus sesuai dengan karakteristik daerah. sebagai contoh adalah apresiasi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Kota Palopo atas kemajuan pendidikan, pemeliharaan lingkungan hidup, pelayanan publik, dan proses demokratisasi. Apresiasi dari beberapa lembaga internasional terhadap kemajuan tersebut melahirkan kepercayaan dari beberapa lembaga-lembaga donor seperti Bank Dunia untuk mengikutsertakan Palopo dalam berbagai program seperti Urban Sector Development Reform Project (USDRP) dan dari Asian Development Bank berupa program Neighbourhood Upgrading Shelter Sector Project, serta hibah bank Dunia untuk pembangunan

beberapa infrastruktur, yang tentunya akan menjadi salah satu peluang bagi bergerakinya lokomotif perekonomian Kota Palopo.

### 3) **Palopo sebagai Kota Budaya**

Secara historis Luwu adalah salah satu kerajaan tertua di Nusantara, dimana Palopo adalah pusat pemerintahan dari kerajaan Luwu. Eksistensi Palopo sebagai bekas pusat Pemerintahan Kerajaan Luwu sangat memungkinkan untuk dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata. Berbagai situs sejarah dan budaya yang menjadi ciri khas sebuah kerajaan adalah peluang yang sangat besar dalam upaya meningkatkan laju pembangunan kepariwisataan. Potensi budaya sebagai daya tarik kepariwisataan yang dimiliki daerah Palopo akan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan.

### 4) **Kerjasama antar daerah**

Kota Palopo yang berusia baru 5 tahun telah menunjukkan berbagai performa pembangunan yang sangat baik. Hal ini merupakan salah satu asset dari segi pencitraan sehingga Palopo bisa dikenal dari luar. Peluang yang bisa diraih dari adanya pencitraan yang baik adalah terbukanya peluang kerjasama antar daerah, baik pada skala regional, nasional bahkan internasional. Beberapa infrastruktur pendukung dari kemungkinan lahirnya kerjasama antar wilayah/daerah telah siap untuk digunakan dan dimanfaatkan antara lain adanya Pelabuhan tanjung ringgit, berkembangnya sarana perhotelan yang rata-rata dari segi pelayanan mulai meningkatkan mutunya. Peluang ini tentunya akan berpengaruh pada meningkatnya perekonomian daerah salah satunya adalah akan meningkatnya occupancy dan perdagangan antar pulau

### 5) **Pemanfaatan Teknologi dan Informasi**

Perkembangan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) termasuk telekomunikasi, media dan informatika (Telematika) pada era globalisasi membuka peluang dan membawa dampak pada perubahan pola

pikir dan cara pandang masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan yang berorientasi pada aspek kemudahan akan kecepatan dalam pertukaran akses informasi dan pelayanan. Teknologi informasi merupakan faktor pendukung bagi pembangunan kota Palopo yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan aspek hukum yang mampu meningkatkan daya saing dalam menghadapi tantangan globalisasi.

#### 6) **Potensi sumber pembiayaan**

Bertumbuhnya lembaga keuangan dan BUMN/BUMD yang ada di Palopo akan menjadi peluang bagi Bergeraknya investasi pembangunan daerah. Hadirnya berbagai lembaga keuangan yang memiliki kredibilitas tinggi menjadi indikator pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi yang semakin baik dan menguntungkan

### b) **Tantangan**

Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pembangunan Kota Palopo ke depan antara lain sebagai berikut :

#### 1) **Penerapan produk Hukum Nasional.**

Sejumlah regulasi dari Pemerintah cenderung yang tidak konsisten berpotensi menghambat jalannya penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan seringkali tidak adanya kesatuan bahasa antara instansi di tingkat pusat dalam mengatur substansi yang sama. Produk-produk hukum pemerintah pusat yang semestinya menjadi pedoman dalam pembangunan daerah masih belum sepenuhnya dapat diwujudkan sebagaimana diharapkan. Demikian pula perangkat peraturan yang pendukung pelaksanaan otonomi lainnya, belum lengkap dan belum konsisten. Keadaan ini memberikan dampak yang kurang kondusif terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.

#### 2) **Kondisi Sosial Politik**

Pasang surutnya kondisi politik dan keamanan secara nasional mempengaruhi situasi perekonomian dan pembangunan di Kota Palopo,

meskipun secara kewilayahan Palopo secara umum dari sisi stabilitas keamanan sangat kondusif. Disamping itu adanya konflik horizontal dan vertikal diluar daerah Palopo termasuk eforia reformasi serta semakin meluasnya jaringan terorisme internasional berpengaruh untuk menimbulkan dampak yang tidak kondusif dalam perkembangan perekonomian daerah .

### 3) **Pengaruh Budaya Luar**

Globalisasi yang tidak diikuti oleh pemahaman yang baik, mebrikan dampak berupa pergeseran-pergeseran nilai orientasi dalam masyarakat semakin terbuka dan meluas, terutama transformasi budaya yang bersifat negatif seperti komersialisasi, individualisme, materialisme dan konsumerisme yang membawa kedangkalan dan kerapuhan dasar-dasar moral, hal ini menjadi tantangan sendiri dalam menggerakkan perekonomian dan pembangunan di daerah.

### 4) **Fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak,**

Bahan bakar minyak, merupakan salah satu hal penting yang berhubungan dengan kehidupan orang banyak, terjadinya perubahan kebijakan pemerintah atas harga dan distribusi bahan bakar minyak akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat,

### 5) **Tantangan dalam upaya mempertahankan kualitas lingkungan hidup**

Permasalahan pokok yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah tidak menyatunya kegiatan perlindungan fungsi lingkungan hidup dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam sehingga sering melahirkan konflik kepentingan antara ekonomi sumber daya alam (pertambangan, kehutanan) dengan lingkungan. Kebijakan ekonomi selama ini cenderung lebih berpihak terhadap kegiatan eksploitasi sumber daya alam sehingga mengakibatkan lemahnya kelembagaan pengelolaan dan penegakan hukum. Sementara itu, kualitas lingkungan juga terus menurun yang ditunjukkan dengan menurunnya persediaan air

dan kualitas air, udara dan atmosfer. Umumnya pencemaran air dari kegiatan manusia disebabkan oleh kegiatan industri, rumah tangga, pertambangan dan pembukaan lahan pertanian. Penyebab pencemaran udara, kebakaran hutan, dan lain-lain. Perubahan kualitas udara dan atmosfer yang terjadi secara berkelanjutan dapat mengakibatkan terjadinya akumulasi berbagai unsur dan senyawa yang membahayakan bagi kelangsungan kehidupan ekosistem. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam sistem, organisasi maupun program kerja pemerintahan baik di pusat maupun daerah masih belum berjalan dengan baik yang berdampak pada degradasi hutan akibat kegiatan ilegal meningkat,

Berdasarkan analisis faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal tersebut di atas, maka dirumuskan beberapa strategi untuk memaksimalkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan dalam meraih dan memanfaatkan peluang yang dimiliki, strategi tersebut adalah :

- a) Memantapkan peran Kota Palopo sebagai sebagai pusat wilayah pengembangan, pusat pelayanan dan kawasan andalan bagian utara Sulawesi Selatan dengan daya dukung hinterland yang sangat potensial, terutama produksi sektor pertanian, jasa, industri, perdagangan
- b) Memaksimalkan peran Kota Palopo sebagai wilayah yang sangat mudah berintegrasi dengan pusat wilayah pengembangan lainnya di Propinsi Sulawesi Selatan antara lain Makassar, Pare-Pare, Watangpone, Mamuju, Majene
- c) Mengoptimalkan peluang pengembangan Kota Palopo sebagai salah satu Kota Jasa dan merupakan salah satu titik sentral wilayah timur nusantara dan memegang fungsi sebagai pintu gerbang keluar masuknya penumpang, barang dan jasa ke Kota-Kota di wilayah seperti Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Kawasan Timur Indonesia lainnya.
- d) Menata pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sebagai modal dasar pembangunan daerah dengan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan

## **B. Isu-Isu Strategik Pembangunan Daerah**

### **A. Umum**

Pembangunan daerah merupakan proses pembaharuan, berkelanjutan, peningkatan, dan pengembangan dari hasil pembangunan yang telah dicapai periode sebelumnya. Pembangunan ke depan mengalami pergeseran paradigma dimana masyarakat atau manusia akan sebagai obyek sekaligus menjadi subyek atau pelaku pembangunan, sebagai motor penggerak pembangunan sedangkan peran pemerintah akan bergeser lebih menjadi fasilitator dan moderator pembangunan.

Berdasarkan konsep pemikiran tersebut di atas dan dengan mengacu pada kondisi obyektif daerah maka titik berat pembangunan nasional dan daerah saat ini sebagaimana dalam arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional lebih bertumpu pada pengembangan kualitas Sumberdaya Manusia sebagai penggerak utama pembangunan, dan optimalisasi pengelolaan potensi sumberdaya alam secara terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya sebagai pendukung. Keberhasilan pembangunan manusia dan ekonomi diharapkan dapat mendorong pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup.

Kebijakan pembangunan Kota Palopo yang merupakan bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional dalam rangka mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional, menggunakan pendekatan kebutuhan, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang serta melalui mekanisme saling memperkuat. Proses pembangunan Kota Palopo yang telah dilaksanakan di seluruh sektor selama ini, telah memberikan hasil positif dan kemajuan yang sangat signifikan, sehingga keadaan tersebut telah menguatkan posisi Kota Palopo sebagai pusat pengembangan wilayah bagi daerah hinterlandnya.

Akan tetapi terdapat berbagai kekurangan baik sebagai akibat dari paradigma pembangunan sentralistik yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata maupun dampak lain dari proses pembangunan itu sendiri dan bahkan dalam

peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang hanya dilakukan secara parsial serta keterbatasan sumber daya dan dana.

Pergeseran paradigma pembangunan yang sentralistik menuju desentralistik dewasa ini, berorientasi pada pembangunan yang bertumpu pada pemberdayaan sumberdaya lokal. Paradigma pembangunan tersebut dimaksudkan untuk dapat menjawab tantangan masa depan baik menghadapi era globalisasi dan informasi maupun dengan adanya pemberian kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah Kota Palopo untuk mengelola pembangunan, termasukantisipasi dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis yang mengarah pada pasar bebas (era globalisasi). Pergeseran paradigma pembangunan tersebut memberikan peluang bagi Kota Palopo untuk lebih mengembangkan inovasi dan kemampuan memberdayakan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki dan upaya peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat. perubahan paradigma pembangunan sesuai jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah beserta peraturan pelaksanaan dengan segala implikasinya.

Dalam rangka lebih mewujudkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang lebih optimal, maka Pemerintah Kota Palopo senantiasa memfokuskan perhatian pada optimalisasi pembangunan sesuai potensi yang dimiliki. Upaya ini dilakukan melalui penajaman pilihan program prioritas sesuai potensi ekonomi, situasi dan kondisi yang ada, serta berbagai kebutuhan sebagai kebijakan strategis dalam kurun tertentu sesuai dinamika sosial dan politik. Pilihan prioritas akan merupakan tolok ukur penilaian kinerja pemerintah, yang dijabarkan lebih lanjut dalam prioritas pembangunan kota Palopo serta memuat berbagai kebijakan dengan mengacu pada kebijakan RPJM Nasional dan RPJM Propinsi Sulawesi Selatan.

## **B. Isu-isu strategik Pembangunan Kota Palopo**

Dengan dasar pemikiran tersebut diatas, maka untuk menentukan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan ke depan, maka pemahaman atas permasalahan-permasalahan pokok dalam pembangunan daerah, sebagai isu-isu

strategik perlu dipahami, sehingga dapat melahirkan keputusan yang tepat. adapun isu-isu strategik pembangunan Kota Palopo antara lain :

**a. Kualitas sumber daya manusia yang lemah**

Meskipun dalam lima tahun terakhir, kualitas sumber daya manusia di Kota Palopo telah mulai meningkat secara kuantitatif, khususnya jika dilihat dari perkembangan data Indeks Pembangunan Manusia, namun secara kualitatif kapasitas dan daya saing sumber daya manusia yang dimiliki relatif masih lemah jika dibandingkan dengan kapasitas dan daya saing sumber daya manusia dari daerah-daerah yang lebih maju khususnya dengan Kabupaten/Kota dari bagian barat Indonesia khususnya Pulau Jawa dan Bali.

IPM yang merupakan indeks kumulatif yang terdiri dari tiga komponen utama yakni pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Sebagai indeks komposit indikator tersebut merupakan angka rata – rata dan sederhana yang dapat dipergunakan untuk melihat mutu manusia secara umum dalam lingkup daerah tertentu dan periode waktu yang tertentu. Dari hasil pengolahan data Susenas 2006 diperoleh informasi bahwa IPM Kota Palopo sudah mencapai sekitar 74,50. Komponen utama dalam Indeks Pembangunan Manusia adalah Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi, tiga komponen tersebut ditunjukkan dengan yakni Usia Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf ( AMH), Rata – Rata lama sekolah dan rata – rata pengeluaran riil, Angka Melek Huruf (AMH) 97,30 % pengeluaran riil Rp.621.400 per orang/bulan dan Usia Harapan Hidup (UHH) 71,60 Tahun serta rata – rata lama sekolah 9,20 tahun sehingga jika dilihat berdasarkan IPM Propinsi Sulawesi Selatan, maka IPM Kota Palopo berada pada peringkat 3 (Tiga), setelah Kota Makassar dan Pare-Pare, dan secara Nasional IPM Kota Palopo berada pada peringkat ke- 50.

Permasalahan dari pemetaan indikator-indikator IPM adalah kontribusi tiga komponen tersebut belum merata, kontribusi pembentukan IPM lebih banyak diberikan oleh komponen pendidikan dan kesehatan, sedangkan komponen kemampuan daya beli masyarakat masih rendah sehinggadiperlukan langkah-langkah percepatan strategis yang akan dilakukan antara lain mendorong

pelaksanaan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga, Mendorong program peningkatan produktivitas ekonomi keluarga, Mendorong pelaksanaan program strategis Pronal Kesra Mandiri sebagai bagian dari upaya pembentukan keluarga mandiri.

Isu strategik dalam pengembangan pendidikan nasional saat ini adalah, kualitas pendidikan yang masih rendah, terlihat dari kondisi yang belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik. Hal tersebut terutama disebabkan oleh belum meratanya kualitas pendidik baik secara kuantitas maupun kualitas serta kesejahteraan pendidik yang juga masih rendah. Disamping itu, fasilitas belajar juga belum tersedia secara memadai. Pada saat yang sama masih banyak peserta didik yang tidak memiliki buku pelajaran. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena belum mantapnya pembagian peran dan tanggungjawab masing-masing tingkat pemerintahan termasuk kontribusi peran pihak swasta yang masih terbatas dalam penyediaan anggaran pendidikan, serta belum terlaksananya standar pelayanan minimal yang seharusnya ditetapkan dengan acuan umum dari pemerintah pusat. Disamping itu efektivitas peran dan fungsi dewan pendidikan dan komite sekolah juga belum optimal.

Dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan ditetapkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan agar dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN dan minimal 20 persen dari APBD, serta mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan dasar gratis, anggaran pendidikan ke depan akan menjadi salah satu bidang prioritas dan diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan secara umum

Kondisi pembangunan bidang pendidikan di Kota Palopo sebagai hasil pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah yang bertumpu pada pengembangan kualitas sumber daya manusia pada periode yang lalu, secara umum memperlihatkan kondisi yang lebih baik jika dilihat pada beberapa indikator seperti indikator akses dan mutu, berbagai kebijakan yang

mendukung penyelenggaraan berbagai program pembangunan bidang pendidikan yang telah dilaksanakan antara lain Pemerataan dan perluasan akses pendidikan, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik dengan memberikan subsidi pelayanan pendidikan khususnya pendidikan formal dalam bentuk Bantuan operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah di tingkat SD dan SMP, sedangkan pada tingkat SMA diberikan subsidi terbatas dalam bentuk Bantuan Khusus Murid (BKM) khusus murid tidak mampu sebanyak 3.247 orang yang dibiayai dari APBN dan APBD Kota Palopo. Pada penyelenggaraan pendidikan non formal sebagai alternatif untuk memperoleh akses pendidikan, juga telah berkembang ditandai dengan terbentuknya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

Hasil dari kebijakan-kebijakan yang berpihak pada pengembangan pelayanan pendidikan telah memberikan hasil positif terutama terhadap terbukanya akses pelayanan pendidikan. Di Kota Palopo indikasi berkembangnya tingkat pelayanan pendidikan terlihat dari meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) diatas rata-rata standar nasional terutama pada tingkat sekolah dasar, pada tahun 2007 APK TK baru mencapai 25,89%, APK SD/MI telah mencapai 122,21%, APK SMP/MTs telah mencapai 115,41%, APK SMA/MA/SMK mencapai 94,26%, demikian pula jika dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM), APM SD/MI mencapai 105,75%, APM SMP/MTs mencapai 98,62%, APM SMA/MA/SMK mencapai 73,25%, sehingga secara relatif Kota Palopo telah dinyatakan tuntas dalam program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Memperoleh pendidikan memang merupakan salah satu hak dasar warga negara, terutama pendidikan yang bermutu dan dengan biaya terjangkau. Mutu pendidikan harus dapat dilihat dan diukur dari berfungsinya out put dari semua fungsi-fungsi pendidikan. Pendidikan harus mampu menciptakan manusia yang berkualitas yang tidak saja memiliki kecerdasan intelektual, memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, penguasaan ilmu pengetahuan dan

teknologi, dengan berpijak pada tata nilai religius, budaya dan adat. sehingga upaya memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan dapat dijangkau (murah) merupakan salah satu amanah konstitusional yang telah dijabarkan ke dalam strategi pembangunan nasional dan harus diakselerasikan dalam kebijakan pembangunan di daerah.

Permasalahan umum yang dihadapi dalam pengembangan pendidikan Kota Palopo adalah, meskipun akses pelayanan pendidikan telah berada di atas standar nasional sebagaimana terlihat dari data APK, namun masih terdapat anak usia sekolah tingkat menengah yang belum atau tidak bersekolah, pada pendidikan anak usia dini baru dapat diakses sekitar 35,79 % sehingga masih tersisa sekitar 64,21 % anak usia dini yang belum terlayani pendidikan PAUD itupun baru mencakup layanan PAUD di Kecamatan pusat kota, sedangkan di kecamatan-kecamatan yang terletak di pinggir kota belum dapat dilayani, pada sisi lain angka buta aksara penduduk Kota Palopo masih tersisa 2,1 % atau kurang lebih 2.626 orang.

Begitu pula jika dilihat dari indikator mutu kesehatan yang digambarkan dengan indikator Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Palopo yang telah mencapai rata-rata lebih dari 70 tahun. Kondisi ini sejalan dengan semakin baiknya kualitas pelayanan kesehatan dan semakin baiknya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Pada tahun 2006 sarana kesehatan masyarakat (puskesmas) telah tersedia di sembilan Kecamatan. Dari puskesmas yang ada tersebut 1 unit merupakan puskesmas perawatan KIA, dan 2 unit puskesmas dengan rawat inap umum dan semua puskesmas telah disiapkan sebagai puskesmas dengan unit gawat darurat (UGD). Puskesmas Pembantu berjumlah 22 unit yang tersebar di 21 kelurahan, pondok bersalin ada di 8 kelurahan sedang pos pelayanan terpadu yang ada sebanyak 126 buah, dan hanya 44 posyandu yang telah purnama dan mandiri. Dari 7 puskesmas semua telah memiliki puskesmas keliling berupa kendaraan roda 4. Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan juga telah cukup tersedia antara lain dengan keberadaan sarana rumah sakit dan klinik yang ada di Kota Palopo terdiri dari rumah sakit pemerintah 1 unit, rumah sakit milik TNI 1 unit, rumah sakit swasta 1 unit,

sedang klinik milik swasta ada 2 unit, milik Polri 1 unit, dan rumah bersalin 3 unit, laboratorium klinik swasta 1 unit.

Jumlah tenaga kesehatan dari Puskesmas dan Rumah Sakit baik Pemerintah, swasta maupun dari TNI/Polri relatif cukup tersedia dimana dari 7 Puskesmas memiliki tenaga tetap sebanyak 116 orang, Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo sebanyak 165 orang, Rumah Sakit Tentara sebanyak 16 orang, tempat pelayanan kesehatan Polri/swasta 46 orang. Distribusi tenaga kesehatan ditempat pelayanan Pemerintah sebanyak 306 yang terinci dapat dilihat sebagai berikut : tenaga medik 33 orang, tenaga perawat 157 orang, tenaga bidang 66, tenaga farmasi/apoteker 12 orang, tenaga sanitarian 4 orang, tenaga kesehatan masyarakat 4 orang, tenaga gizi 10 orang, tenaga terapi fisik 4 orang, tenaga teknisan medis sebanyak 14 orang, dan selebihnya tenaga lainnya sebanyak 48 orang.

Namun demikian permasalahan umum yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan secara nasional dan juga di daerah adalah munculnya beberapa penyakit menular baru yang biasa disebut *emerging diseases* seperti flu burung, SARS, dan meningkatnya kembali kejadian beberapa penyakit antara lain malaria, tuberkulosis, polio, campak, leptospirosis, *Human Immuno Deficiency Virus* (HIV), lepra, demam berdarah dengue, *anthrax*, *Japanese B. encephalitis*, filariasis yang merupakan tantangan yang memerlukan penelitian, pengembangan dan penerapan Ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu terdapat juga beberapa penyakit yang masih terabaikan (*neglected diseases*) seperti kusta, frambusia dan taeniasis/cysticercosis.

Tantangan yang dihadapi ke depan dalam permasalahan kesehatan di Indonesia adalah beban ganda penyakit yang digambarkan dengan masih tingginya kejadian penyakit menular dan meningkatnya sindrom metabolik (penyakit kronik seperti penyakit kardiovaskuler, obesitas dan lain-lain) serta degeneratif, di samping itu disparitas status kesehatan berdasarkan tingkat

sosial ekonomi yang masih akan menjadi masalah hingga tahun 2025, serta terjadinya mobilisasi penduduk (people movement) yang tinggi.

Masalah lainnya terkait dengan kualitas sumber daya manusia adalah masih tingginya laju pertumbuhan penduduk, meskipun secara nominal telah berada di bawah rata-rata laju pertumbuhan penduduk nasional, belum tertatanya administrasi kependudukan dalam rangka membangun sistem pembangunan, pemerintahan, dan pembangunan yang berkelanjutan; rendahnya kualitas pemuda; dan rendahnya budaya olahraga di kalangan masyarakat dan pembinaan prestasi olahraga yang belum terprogram secara terpola.

Kesejahteraan sosial masyarakat relatif masih rendah antara lain tercermin dari anak maupun lanjut usia yang terlantar, kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan korban bencana alam dan sosial masih rendah. Dalam pembangunan pemberdayaan perempuan, permasalahan mendasar yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, di samping masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi terhadap perempuan. Permasalahan mendasar lainnya adalah masih terdapatnya kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosio-kultural masyarakat. Dalam konteks, sosial, kesenjangan ini mencerminkan masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas.

Masalah lainnya adalah rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan; tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, termasuk ketersediaan data, dan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.

Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara masih memprihatinkan. Ajaran agama belum sepenuhnya diaktualisasikan dalam kehidupan agama secara nyata. Perilaku masyarakat yang cenderung negatif seperti perilaku asusila,

praktik KKN, penyalahgunaan narkoba, dan perjudian sering muncul ke permukaan. Di samping itu permasalahan dalam membangun agama adalah masih belum kondusifnya harmonisasi kehidupan sosial di dalam masyarakat. Ketegangan sosial yang memicu konflik intern dan antarumat beragama akan merusak tatanan kehidupan masyarakat yang pada akhirnya menurunkan tingkat kesejahteraan itu sendiri.

Kondisi-kondisi tersebut diatas paling tidak memberikan gambaran mengenai masih terbatasnya kapasitas dan daya saing dari sumber daya manusia yang kita miliki dalam memanfaatkan atau menciptakan peluang kerja untuk diri sendiri dan lingkungannya serta masih terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia.

**b. Kesenjangan Hasil Pembangunan**

Paradigma Pembangunan nasional dan daerah yang bertumpu pada pembangunan ekonomi di masa lalu, memang telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun sekaligus juga mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk dipecahkan. Titik berat pembangunan masa lalu kepada tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah menciptakan peningkatan pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur akan tetapi pembangunan ekonomi yang sangat berorientasi kepada peningkatan produksi, tanpa disertai oleh pembangunan dan perkuatan insituti-insituti baik institusi publik maupun insituti pasar terutama institusi keuangan yang seharusnya berfungsi melakukan alokasi sumber daya secara efisien dan bijaksana. Bahkan proses pembangunan ekonomi yang ditopang oleh sistem represi dan ketertutupan telah melumpuhkan berbagai insituti strategis seperti sistem hukum dan peradilan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, sistem politik untuk terciptanya mekanisme kontrol dan keseimbangan (*check and balances*), dan sistem sosial yang diperlukan untuk memelihara kehidupan yang harmonis dan damai.

Hasil dari pembangunan ekonomi yang dicapai justru menimbulkan akibat negatif dalam bentuk kesenjangan antar golongan pendapatan, antar wilayah, dan antar kelompok masyarakat. Di Kota Palopo kondisi yang dimaksud sangat terlihat dari kenyataan, bahwa meskipun pendapatan perkapita penduduk Kota Palopo setiap tahun mengalami peningkatan hingga pada tahun 2007 telah mencapai Rp.7,2 Juta/kapita, namun ketimpangan distribusi pendapatan masih cukup dalam, jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan masih tinggi yakni mencapai 14,50 % dari jumlah penduduk 133.990 jiwa dengan rata-rata pendapatan perkapita Rp. 1,8 juta s/d 2 juta / kapita/tahun.

Kondisi perubahan kebijakan ekonomi secara nasional memang sangat rentan terhadap meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan secara adil dan merata. Perubahan kebijakan ekonomi nasional dengan alasan mengantisipasi akibat krisis ekonomi yang berlangsung sejak tahun 1998 telah memberikan pelajaran yang sangat mahal namun berharga bagi bangsa Indonesia. Secara nasional krisis telah memaksa Indonesia melakukan perubahan yang perlu dalam rangka koreksi kelemahan dan kesalahan masa lalu. Ekonomi, politik, sosial dan hukum mengalami transformasi dan reformasi menuju kepada suatu sistem baru yang diharapkan akan lebih berkeadilan, handal, dan berkelanjutan. Perubahan kebijakan nasional terutama kebijakan menyangkut pemenuhan hak hidup orang banyak seperti bahan bakar minyak, memberikan pengaruh yang sangat besar dan berat bagi berlangsungnya pembangunan di daerah.

Kesenjangan pembangunan antar wilayah dalam daerah dapat pula dijumpai pada titik-titik strategis seperti menyangkut ketimpangan antara wilayah pesisir, kota, dan pegunungan. wilayah perkotaan dengan wilayah pedesaan (pesisir dan pegunungan), antar kebijakan maupun antar pelaku yang menyebabkan optimalisasi input terhadap output tidak dapat terpenuhi. Dengan kondisi demikian, keserasian pembangunan daerah merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Palopo dalam memfasilitasi kebijakan keserasian pembangunan daerah, fasilitasi

penyusunan strategi keserasian pembangunan daerah, dan fasilitasi interaksi multi pelaku dalam keserasian pembangunan daerah dan fasilitasi keserasian pengelolaan pembangunan daerah.

**c. Produktivitas ekonomi yang masih rendah**

Sektor pertanian merupakan sektor utama dalam perekonomian penduduk Kota Palopo, penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 12.261 jiwa (31%), dan dilihat dari kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB terlihat bahwa sektor pertanian secara umum masih menjadi kontributor terbesar dalam pembentukan PDRB yakni sekitar 36,37 %, keadaan ini didukung oleh potensi lahan pengembangan pertanian dan dukungan wilayah-wilayah hinterland, dapat diuraikan bahwa potensi pengembangan lahan pertanian Kota Palopo seluas 24.752 Ha, terdiri dari lahan sawah seluas 2.964 ha, tegal / kebun seluas 3.116 ha, pekarangan seluas 3.027, hutan rakyat seluas 737 ha, hutan negara seluas 9.227 ha, perkebunan seluas 2.218 ha dan rawa-rawa seluas 4 ha. Dan bila dilihat dari luasnya lahan pengembangan tahun 2006, terdapat sebanyak 2.964 Ha lahan sawah, 1.146 ha lahan kering, lahan jagung, 1.564 Ha lahan buah-buahan, dan 179 ha lahan sayur-sayuran. Dukungan lainnya adalah dukungan infrastruktur sarana dan prasarana pengembangan pertanian khususnya lahan padi sawah telah didukung oleh infrastruktur irigasi, dengan jenis irigasi sebagai berikut, luas sawah yang telah didukung dengan irigasi setengah teknis sebanyak 850 ha, sawah dengan irigasi sederhana sebanyak 846 ha, sawah dengan irigasi desa sebanyak 965 ha, dan irigasi tadah hujan sebanyak 305 ha

Rendahnya produktivitas hasil pertanian dapat pula dilihat dari rata-rata produksi padi yang baru mencapai 4,25 ton/Ha, produksi pada tahun 2006 sebesar 22.645,44. ton dari luas areal sawah seluas 5.322 Ha sementara jika dibandingkan dengan produksi padi di tempat lainnya di Sulawesi Selatan telah mencapai 8 ton/HA, produktivitas hasil tambak baru mencapai 4,7 ton/ha jumlah produksi ikan tambak pada tahun 2007 berjumlah 7.400 ton dari areal lahan tambak seluas 1.556 Ha, kondisi ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan produktivitas hasil tambak pada daerah lainnya di

Sulawesi Selatan, produktivitas tanaman kakao di Kota Palopo tahun 2006 baru mencapai 300-400 kg ton/ha dari luas areal panen 1.410 Ha,

Produktivitas ekonomi masyarakat yang terbatas juga dapat dilihat dari prosentase Penduduk miskin absolut di Kota Palopo. berdasarkan data BPS tahun 2006 terlihat bahwa sebagian besar tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan (menganggur) yakni sekitar 43,71%, yang bekerja di sektor informal sekitar 40,14% pekerja sektor informal memiliki tingkat produktifitas yang rendah dan terbatas sehingga dapat dikategorikan setengah pengangguran, disamping sifat pekerjaan yang tidak tetap. Sedangkan sisanya bekerja di sektor formal sekitar 16,15%, kelompok ini sesungguhnya telah berproduksi namun pendapatannya belum dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Penduduk miskin di Kota Palopo kebanyakan di sektor non pertanian, selain sebagai nelayan, buruh lepas dan harian, pedagang kecil, sedangkan di sektor pertanian mereka pada umumnya merupakan petani dengan lahan yang terbatas, nelayan dengan sarana tradisional. Penduduk miskin di Kota Palopo yang bekerja di sektor formal dan informal bidang pertanian 24,25%, sedangkan sisanya di bidang non pertanian 31,25%

Upaya untuk mendorong peningkatan produktivitas sektor pertanian, pengembangan sektor pertanian dihadapkan pada permasalahan pokok antara lain, meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dapat menyebabkan menurunnya ketersediaan air dan daya dukung prasarana irigasi, rendahnya produktivitas dan mutu komoditas pertanian, serta rendahnya kemampuan dan akses petani terhadap sumber daya produktif. Sementara itu terdapat ketidakseimbangan tingkat pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan antar kawasan; adanya kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang ilegal dan merusak, belum optimalnya pengembangan perikanan budidaya, meningkatnya kerusakan lingkungan di kawasan pesisir yang menurunkan daya dukungnya, dan belum lengkapnya regulasi dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, termasuk penegakan hukum.

Pada sisi lain produktivitas ekonomi daerah juga dipengaruhi oleh kondisi terbatasnya kesempatan kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2007 tingkat pengangguran terbuka di Kota Palopo mencapai 11,4 % dan mengalami penurunan rata-rata setiap 1 % setiap tahun, pada tahun 2003 mencapai 14,42 %. Tingginya jumlah pencari kerja sementara kesempatan kerja yang tersedia terbatas antara lain dapat dilihat dari jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan. Pada tahun 2003 jumlah pencari kerja sebanyak 3.912 orang yang berhasil ditempatkan sebanyak 166 orang atau 4,2 %, pada tahun 2007 jumlah pencari kerja terdaftar sebanyak 10.060 orang dan yang berhasil ditempatkan sebanyak 1.206 orang atau 11,9% dengan demikian terjadi peningkatan kemampuan dalam menempatkan pencari kerja sebesar 7,7%.

**d Profesionalisme aparatur pemerintah masih rendah dan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat masih lemah**

Kemampuan sumber daya aparatur dalam mengimplementasikan ilmu, memanfaatkan pengetahuan dan teknologi juga masih rendah. Salah satu indikator kelemahan tersebut adalah belum adanya standar pelayanan yang baku terhadap semua jenis pelayanan publik, disamping itu sebagai tanggapan terhadap tuntutan reformasi birokrasi adalah penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) yang berbasis pada prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas. Kehadiran lembaga – lembaga swadaya masyarakat sebagai mitra pemerintah menjadi sebuah peluang dalam menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik.

**e. Tantangan dalam upaya mempertahankan kualitas lingkungan hidup**

Kualitas manusia dipengaruhi juga oleh kemampuan dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup. Permasalahan pokok yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah tidak menyatunya kegiatan perlindungan fungsi lingkungan hidup dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam sehingga sering melahirkan konflik kepentingan antara ekonomi sumber daya alam (pertambangan, kehutanan) dengan lingkungan. Kebijakan ekonomi selama ini cenderung lebih berpihak terhadap kegiatan eksploitasi sumber daya alam sehingga mengakibatkan lemahnya

kelembagaan pengelolaan dan penegakan hukum. Sementara itu, kualitas lingkungan juga terus menurun yang ditunjukkan dengan menurunnya persediaan air dan kualitas air, udara dan atmosfer. Umumnya pencemaran air dari kegiatan manusia disebabkan oleh kegiatan industri, rumah tangga, pertambangan dan pembukaan lahan pertanian. Penyebab pencemaran udara, kebakaran hutan, dan lain-lain. Perubahan kualitas udara dan atmosfer yang terjadi secara berkelanjutan dapat mengakibatkan terjadinya akumulasi berbagai unsur dan senyawa yang membahayakan bagi kelangsungan kehidupan ekosistem.

Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam sistem, organisasi maupun program kerja pemerintahan baik di pusat maupun daerah masih belum berjalan dengan baik. Degradasi hutan yang disebabkan berbagai kegiatan ilegal meningkat yang menyebabkan areal hutan mengalami disfungsi secara perlahan, sehingga saat ini luas hutan di Kota Palopo tinggal 6.724 Ha terdiri dari hutan rakyat 1.556,85 Ha dan hutan negara 5.167,32 Ha. Kerusakan pada daerah pesisir pantai sepanjang garis pantai sepanjang kurang lebih 20km juga terlihat adanya abrasi pantai, padahal daerah pesisir tersebut merupakan lahan untuk perairan budidaya 2.975,50 Ha. Kerusakan lingkungan antara lain terlihat dari pendangkalan sungai dan abrasi pantai setiap tahun.

Upaya rehabilitasi memang telah dilakukan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, khususnya rehabilitasi hutan dan mangrove, sehingga rehabilitasi lahan kritis yang dilakukan telah berhasil merehabilitasi lahan kritis seluas 3.175 Ha, pada tahun 2003 luas lahan kritis seluas 8.857 Ha terdiri dari Hutan Lindung seluas 2.341 Ha dan Hutan Rakyat seluas 6.516 Ha, sehingga lahan kritis yang belum direhabilitasi sampai dengan tahun 2007 seluas 5.682 Ha.

**f. Kapasitas infrastruktur daerah yang masih terbatas**

Perbaikan kesejahteraan rakyat sangat ditentukan oleh dukungan infrastruktur sarana dan prasarana daerah berupa sarana pelayanan sosial dasar dan penyediaan infrastruktur yang meliputi transportasi, ketenagalistrikan, energi,

sumber daya air, perumahan, pelayanan air minum, dan penyehatan lingkungan, kondisinya belum terpenuhi secara merata, sebagaimana telah digambarkan bahwa sarana dan prasarana inprastruktur masih belum terdistribusi secara merata. Pembangunan inprastruktur mendatang dihadapkan pada tingginya biaya investasi pembangunan dan terbatasnya kemampuan pemerintah untuk menyediakan karena keterbatasan sumber pendanaan. Pada sebagian inprastruktur, pemerintah masih bertanggungjawab terhadap pembangunan dan pemeliharannya, misalnya pembangunan jalan, jaringan irigasi, air bersih dan irigasi, serta listrik perdesaan. Pada sebagian lain, penyediaan dan pembangunan beberapa jenis inprastruktur sebenarnya dapat dilakukan sepenuhnya oleh swasta seperti jalan lingkar, pembangkit tenaga listrik, dan telekomunikasi.

**g. Rendahnya kualitas pelayanan umum.**

Isu strategik dalam pelayanan umum adalah rendahnya kualitas pelayanan umum yang antara lain disebabkan oleh kinerja sumber daya aparatur yang masih lemah, belum memadainya sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan, rendahnya kesejahteraan PNS, serta banyaknya peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan, serta peraturan – peraturan yang implementasinya justru kontraproduktif. Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dilakukan dengan mendorong terlaksananya prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan, penyusunan standar pelayanan minimal pada setiap jenis pelayanan publik.